

DECENT WORK

A better world starts here.



International
Labour
Organization

Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran: Peran dari Serikat Pekerja dengan Pendekatan Empat Pilar

Pong-Sul Ahn
Regional Specialist on Workers' Education
ILO ROAP



Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja: dasar dan pedoman untuk pendekatan yang berasaskan hak-hak pekerja

Diadopsi pada ILC ke-92 pada tahun 2004

Tujuan

- Memanfaatkan keuntungan yang didapatkan dari migrasi tenaga kerja, dan melindungi hak-hak pekerja migran melalui proses migrasi yang aman
- Identifikasi area prioritas untuk kerjasama pembangunan dalam rangka membantu negara-negara anggota

Rencana Aksi

- Mengaplikasikan standar pekerja internasional dan instrumen yang berkaitan lainnya terhadap area yang lebih luas
- Mengimplementasikan Global Employment Agenda
- Proteksi sosial terhadap Pekerja Migran
- Membangun kapasitas, meningkatkan kesadaran dan bantuan teknis
- Memperkuat dialog sosial
- Memperbaiki database informasi dan pengetahuan

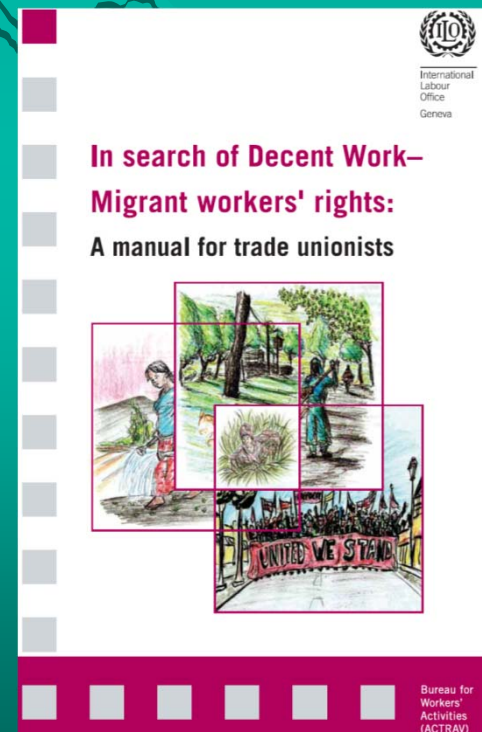
Pendekatan Empat Pilar berdasarkan pada “An ACTRAV manual for trade unionists: In Search of Decent Work-Migrant Workers’ Rights (2008)”

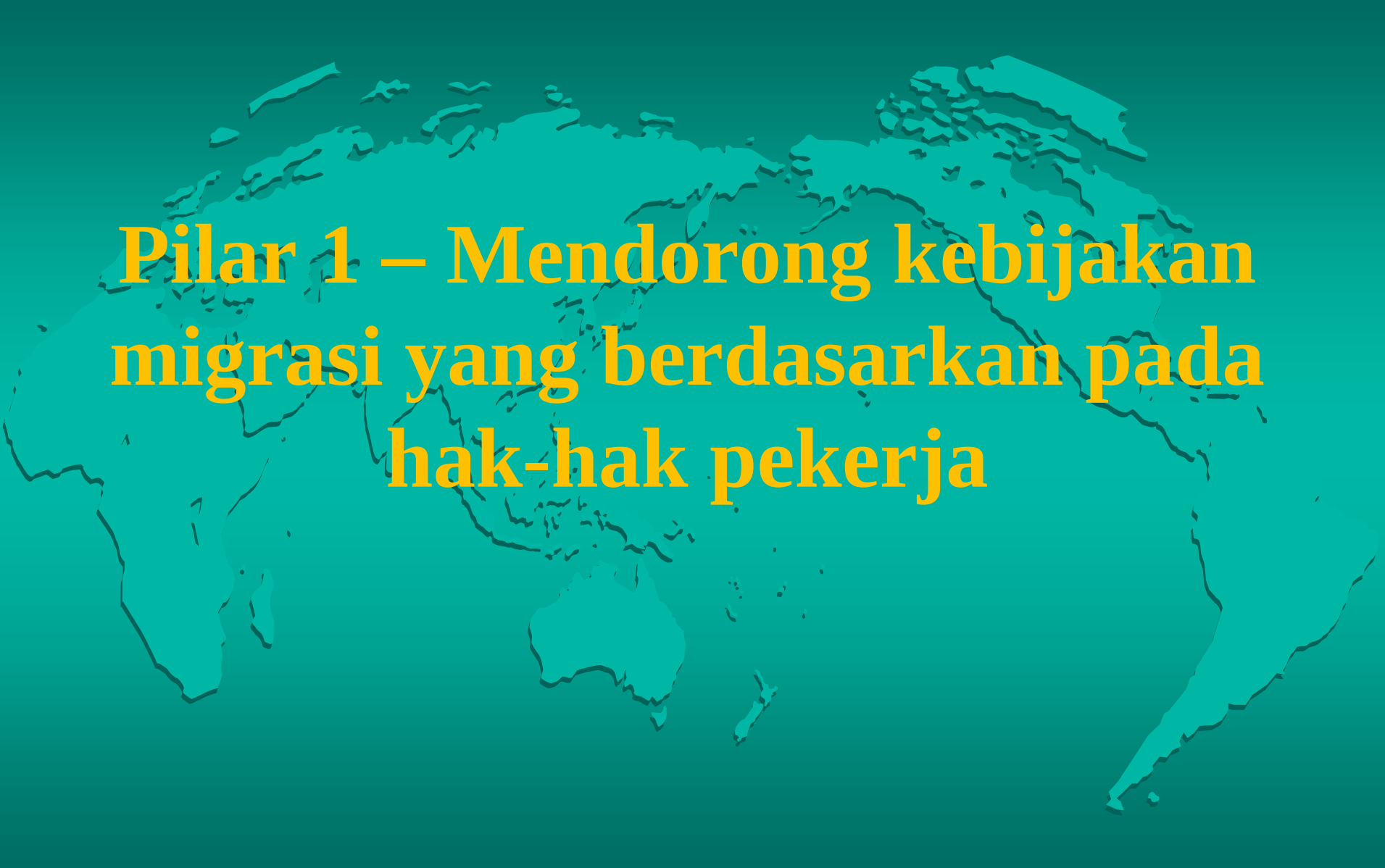
Pilar 1: Mendorong kebijakan migrasi yang berdasarkan pada hak-hak pekerja

Pilar 2: Membuat jaringan Serikat Pekerja pada negara pengirim dan penerima pekerja (MOU)

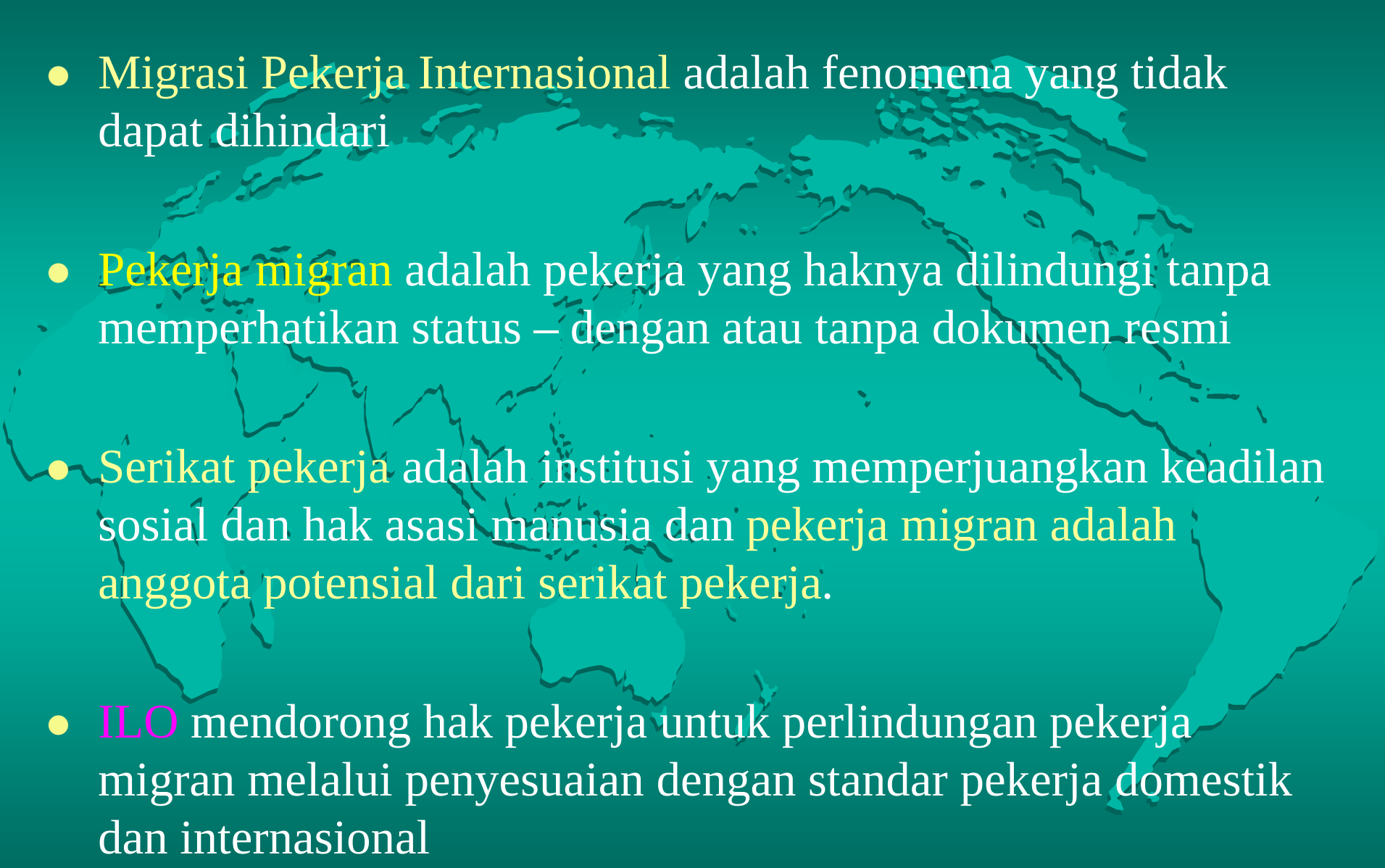
Pillar 3: Menjangkau pekerja migran

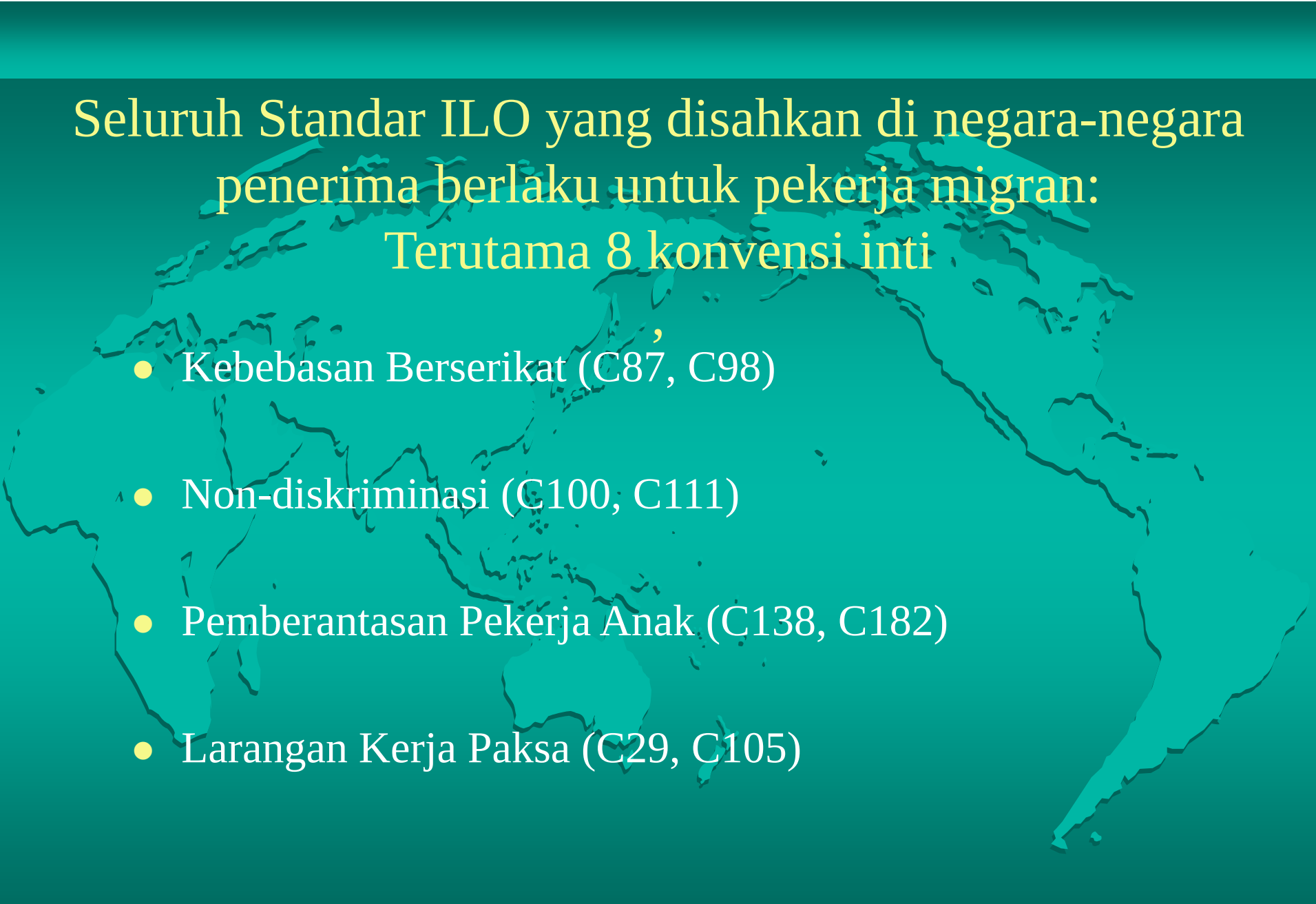
Pillar 4: Mendidik, melatih dan mengadvokasi





Pilar 1 – Mendorong kebijakan migrasi yang berdasarkan pada hak-hak pekerja

- 
- **Migrasi Pekerja Internasional** adalah fenomena yang tidak dapat dihindari
 - **Pekerja migran** adalah pekerja yang haknya dilindungi tanpa memperhatikan status – dengan atau tanpa dokumen resmi
 - **Serikat pekerja** adalah institusi yang memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia dan **pekerja migran** adalah anggota potensial dari serikat pekerja.
 - **ILO** mendorong hak pekerja untuk perlindungan pekerja migran melalui penyesuaian dengan standar pekerja domestik dan internasional

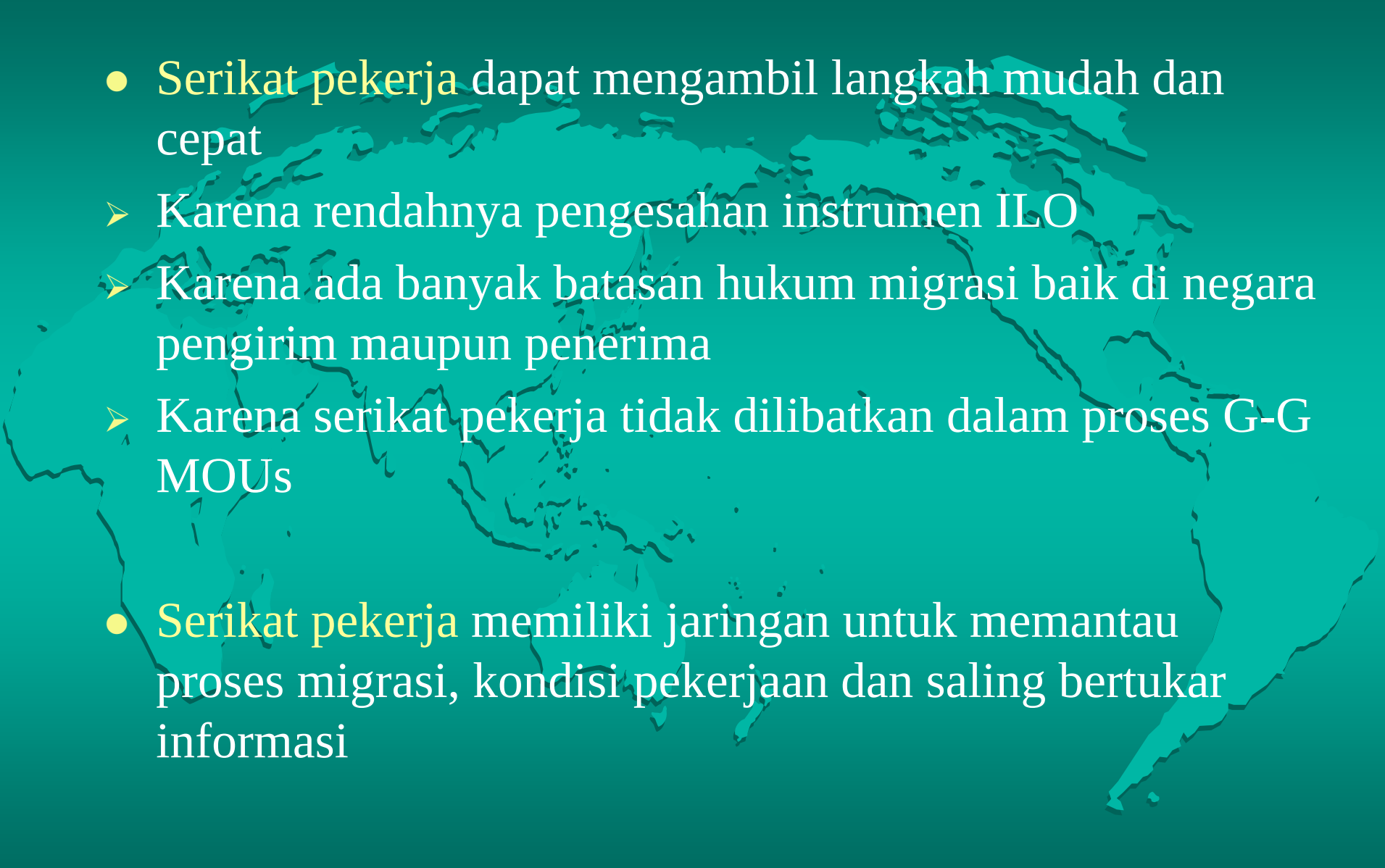


Seluruh Standar ILO yang disahkan di negara-negara penerima berlaku untuk pekerja migran: Terutama 8 konvensi inti

- Kebebasan Berserikat (C87, C98)
- Non-diskriminasi (C100, C111)
- Pemberantasan Pekerja Anak (C138, C182)
- Larangan Kerja Paksa (C29, C105)



Pilar 2 – Mendorong MOU diantara serikat pekerja di negara pengirim dan penerima pekerja

- 
- **Serikat pekerja** dapat mengambil langkah mudah dan cepat
 - Karena rendahnya pengesahan instrumen ILO
 - Karena ada banyak batasan hukum migrasi baik di negara pengirim maupun penerima
 - Karena serikat pekerja tidak dilibatkan dalam proses G-G MOUs
 - **Serikat pekerja** memiliki jaringan untuk memantau proses migrasi, kondisi pekerjaan dan saling bertukar informasi

MOU Model ACTRAV untuk Perlindungan Hak Pekerja Migran

- **Mengapa:** Pengembangan model MOU ditujukan untuk membantu serikat pekerja sehingga dengan mudah dapat digunakan sebagai acuan dan diadopsi.
- **Bagaimana:** Dirancang dalam sebuah pertemuan antar benua antara serikat pekerja di negara-negara pengirim yang terletak di Asia dan negara-negara penerima yang terletak di Timur Tengah. Pertemuan tersebut diadakan di Amman, Jordan pada Desember 2008

Kasus 1: MOU antara serikat pekerja Thailand dan Kamboja, yang merinci kerjasama mereka

- MOU Serikat Pekerja Thailand-Kamboja ditandatangani pada Nov.2013

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN TRADE UNIONS IN CAMBODIA AND TRADE UNIONS IN THAILAND ON PROTECTION OF MIGRANT WORKERS' RIGHTS

PREAMBLE

The Trade Unions in Cambodia undersigned and the Trade Unions in Thailand undersigned, are hereinafter referred as "the parties".

The parties agreed to develop a Memorandum of Understanding (MOU) with a view to facilitating joint activities on protection of migrant workers' rights. The MOU promotes a rights-based policy when dealing with issues related to the protection, education and organizing of migrant workers.

The outline of this MOU is guided by the ACTRAV trade union manual, "In Search of Decent Workers – Migrant Workers' Rights", which aims at assisting trade union organisations to carry out activities based on the ILO instruments (C97 and C143) and various resolutions concerning labour migration, adopted by the international and regional trade union movement.

By signing this MOU, the parties are:

AFFIRMING the importance of migration for employment between Cambodia and Thailand and its positive contribution to the economies of both countries;

CONVINCING that the benefits of labour migration can be maximized through the effective governance system and respect for workers' human and labour rights, enshrined by ILO Fundamental Principles and Rights at Work adopted at International Labour Conference, 1998 as well as within the concepts of ILO decent work;

ASCERTAINING that the situation of migrant workers should be addressed through the principles of international trade union solidarity, social justice, equal treatment, equal opportunity, and gender equity;

REAFFIRMING that freedom of association and the right to collective bargaining are a central and non-negotiable principle.

Acara Penandatanganan



IN WITNESS WHEREOF, both parties have signed this MOU in English with the technical assistance of the ILO Bangkok. The MOU will be translated into Thai and Khmer.

Prior to the revision or nullification of the MOU, both parties will discuss and agree on it. The MOU shall be effective upon signature

On November 11, 2013 in Rayong, Thailand

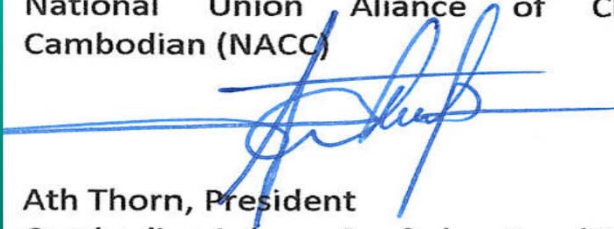
With representatives of the undersigned trade unions



Chuon Mom Thol, President
Cambodian Confederation of Trade Unions
(CCTU)



Som Aun, President,
National Union Alliance of Chamber of
Cambodian (NACC)



Ath Thorn, President
Cambodian Labour Confederation (CLC)



Thavee Techateeravat, President
Thai Trade Unions Council (TTUC)



Hussachai Payaban, Executive Committee
for Organising,
Labour Congress of Thailand (LCT)



Tawatchai Pholcharoen, Vice-President
National Congress of Private
Industrial Employees (NCPE)

Kasus 2: MOU antara VGCL dan MTUC

1. Delegasi VGCL yang terdiri dari empat orang anggota mengunjungi Malaysia dari 28-31 Oktober 2012 untuk memahami permasalahan pekerja migran Vietnam.
2. Pada workshop VGCL tentang migrasi yang diadakan di Thang Hoa pada 26-27 Februari 2013, salah satu petinggi MTUC diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman MTUC dalam menangani masalah migrasi.
3. Delegasi VGCL yang terdiri dari empat orang anggota mengunjungi Malaysia pada 13-16 Dec. 2014 untuk mendiskusikan rancangan MOU untuk kerjasama bilateral
4. Ketua MTUC yang memimpin 6 orang anggota delegasi ke Hanoi (13-17 Maret 2015) menandatangani MOU dengan Ketua VGCL.
5. Delegasi VGCL berencana untuk mengunjungi Kuala Lumpur pada awal Februari 2018 untuk meninjau ulang MOU.

Acara Penandatanganan pada 16 Maret 2015



Kasus 3: MOU oleh ATUC, SARTUC Arab TUC

- Ditandatangani di Kochi, India pada September 2015
- Dengan tujuan untuk:
 - i. Mengkampanyekan pengesahan dan pelaksanaan Konvensi ILO tentang pekerja migran;
 - ii. Pendirian pusat informasi (Migrant Resources Centers) untuk membangun jaringan, pengetahuan, orientasi pra-keberangkatan dan program pasca-kedatangan serta layanan langsung oleh serikat pekerja;
 - iii. Mengorganisir pekerja migran baik di negara tujuan maupun negara asal, dll.
- Pertemuan peninjauan ulang MOU direncanakan untuk diadakan di Asia, pertengahan 2017



Pilar 3 – menjangkau (mengorganisir) pekerja migran

Kasus 1: FADWU di Hong Kong

- ACTRAV meluncurkan proyek yang bekerjasama dengan HKCTU selama 1 tahun, bertujuan untuk membentuk federasi pekerja rumah tangga migran di Hong Kong.
- Proyek ini sukses membentuk “Federation of Asian Domestic Workers’ Unions” (FADWU) pada 21 November 2010.
- FADWU is terdiri dari 6 serikat pekerja rumah tangga, termasuk:
 - ✓ Serikat Pekerja Migran Indonesia
 - ✓ Hong Kong Domestic Workers General Union
 - ✓ Filipino Domestic Helpers General Union, Hong Kong
 - ✓ Union of Nepalese Domestic Workers in Hong Kong
 - ✓ Overseas Domestic Workers’ Union – HK
 - ✓ Thai Migrant Workers’ Union Hong Kong
- Hari Buruh 2013: <http://www.youtube.com/watch?v=FD1eCPTKFaI>

Pemilihan Komite Eksekutif



Tugas FADWU untuk ke depannya

- Harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara 6 serikat pekerja
- Meningkatkan keanggotaan berbayar
- Merespon ekspektasi tinggi dari anggota serikat untuk adanya keuntungan langsung
- Menanggapi meningkatnya keluhan individu
- Berkampanye untuk cakupan upah minimum untuk pekerja rumah tangga

Kasus 2: GEFONT di Nepal

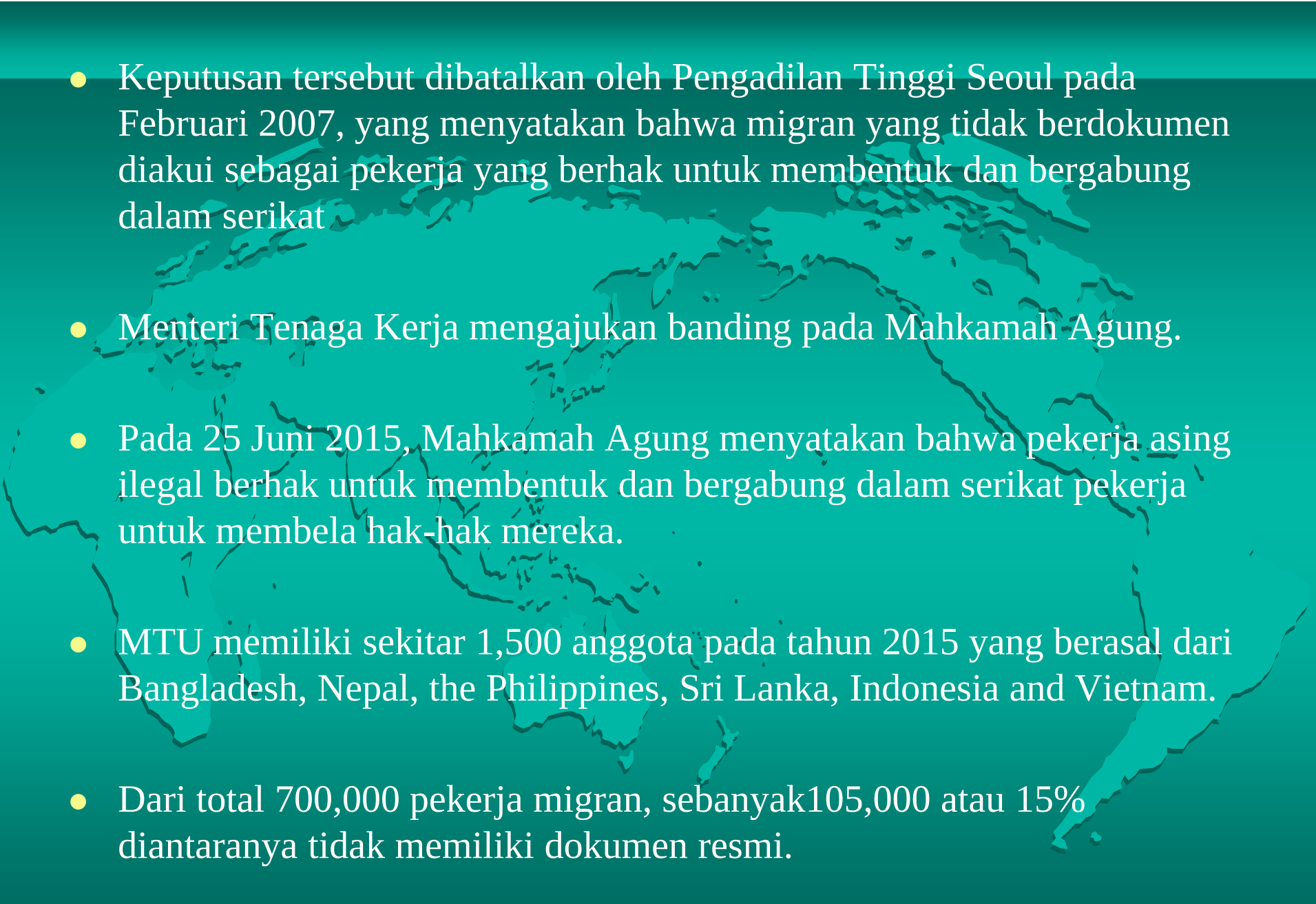
- GEFONT bersikap proaktif dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan juga mengorganisir migran asal Nepal.
- GEFONT sudah terjun untuk bekerja dalam isu pekerja migran Nepal sejak 1996.
- Mendirikan Departemen Migrasi dan Komite Migran yang terdiri dari empat orang anggota pada tahun 2004
- Komite Migran GEFONT telah mengorganisir pekerja migran Nepal dan memiliki grup pendukung di berbagai negara seperti Korea, Malaysia, UAE, Saudi Arabia, Israel, Hong Kong dan India

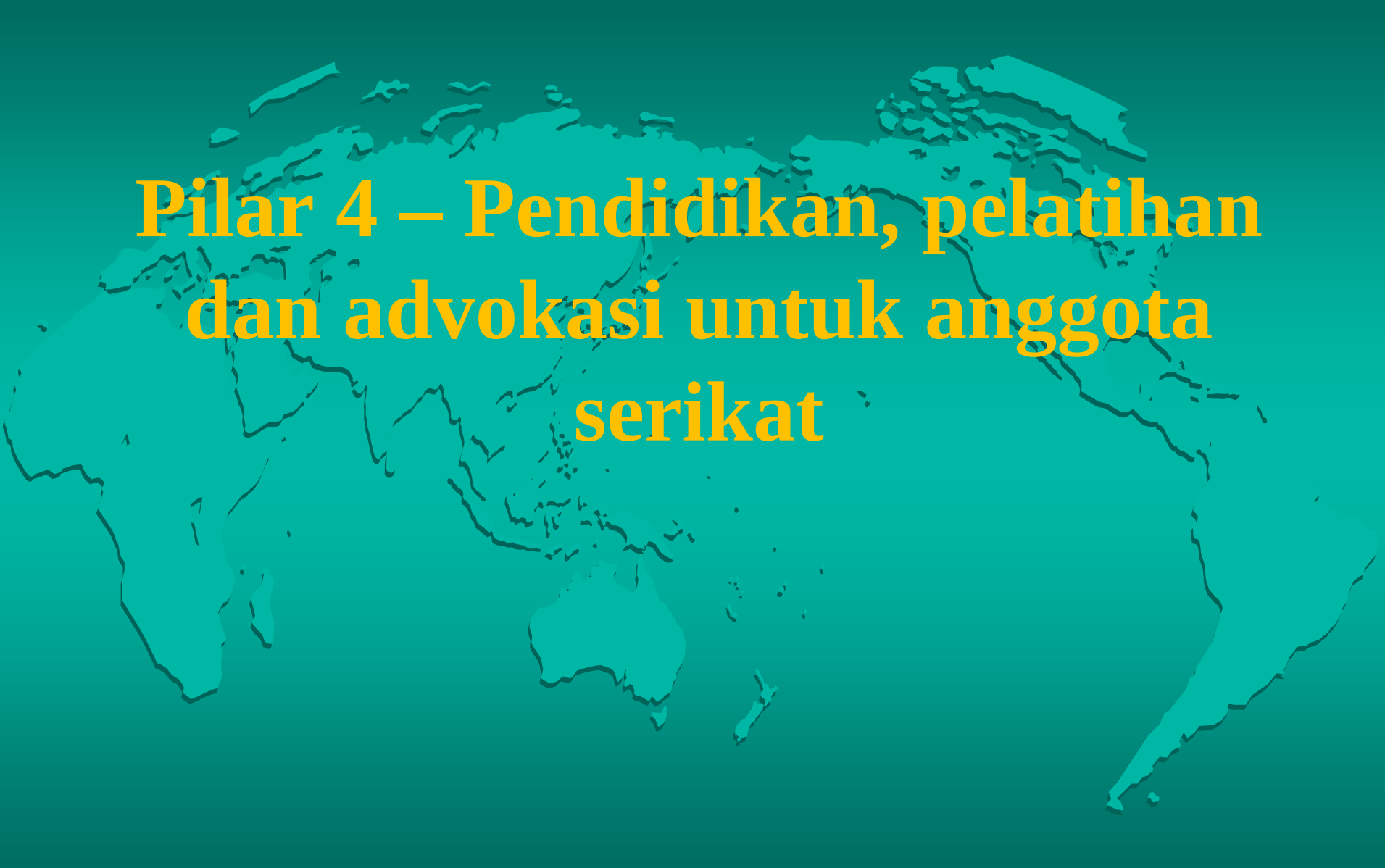
Kasus 3: Migrants' Trade Union (MTU) di Korea



Pada tahun 2005, Migrants' Trade Union (MTU) terbentuk dan 91 pekerja asing di Provinsi Seoul, Incheon and Gyeonggi melayangkan gugatan melawan MOEL untuk menyangkal pengakuan organisasi tersebut.

Pada tahun 2006, pengadilan administratif menyatakan bahwa hukum yang berlaku tidak mengakui mereka sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan hukum

- 
- Keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Seoul pada Februari 2007, yang menyatakan bahwa migran yang tidak berdokumen diakui sebagai pekerja yang berhak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat
 - Menteri Tenaga Kerja mengajukan banding pada Mahkamah Agung.
 - Pada 25 Juni 2015, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pekerja asing ilegal berhak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk membela hak-hak mereka.
 - MTU memiliki sekitar 1,500 anggota pada tahun 2015 yang berasal dari Bangladesh, Nepal, the Philippines, Sri Lanka, Indonesia and Vietnam.
 - Dari total 700,000 pekerja migran, sebanyak 105,000 atau 15% diantaranya tidak memiliki dokumen resmi.



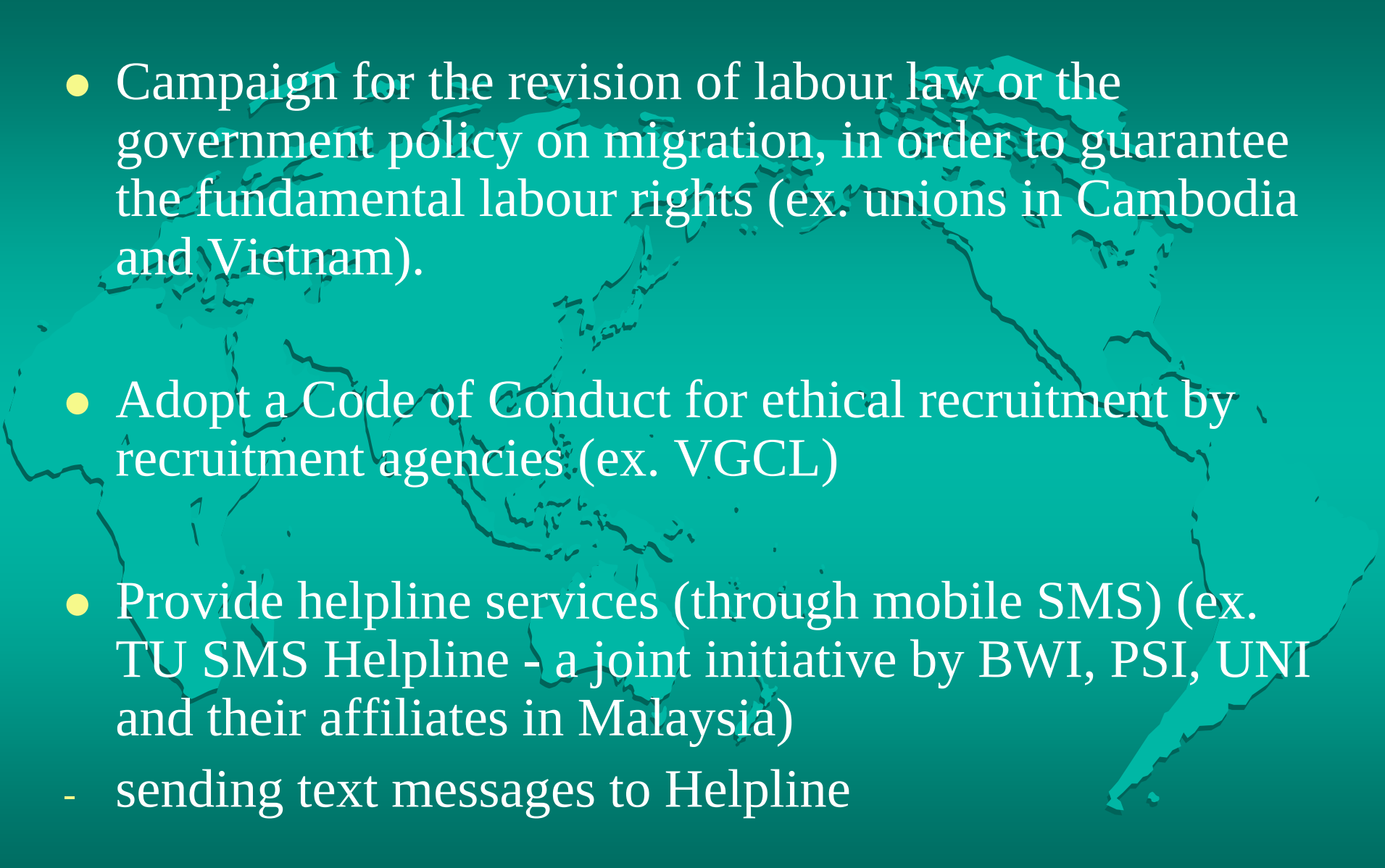
Pilar 4 – Pendidikan, pelatihan dan advokasi untuk anggota serikat

Beberapa contoh peran serikat pekerja dalam pendidikan/pelatihan dan advokasi

- Migrant Worker Resource Centres (MRCs) dijalankan oleh serikat pekerja di Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar dan Malaysia
- Layanan informasi dan konseling
- Tugas ke depannya
 - visualisasi of the MRC kepada para migran
 - Pengembangan kapasitas staf MRC;
 - Kolaborasi yang lebih baik dengan pemerintahan dan pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus pengaduan



- 
- Menetapkan “Hari Hak Pekerja Migran Internasional” pada 18 Desember and meningkatkan kesadaran publik terhadap peran positif pekerja migran baik di negara pengirim maupun negara penerima
 - Terlibat dalam pelatihan pra-keberangkatan, menyediakan informasi tentang hukum dan kontak yang berguna di negara tujuan kepada calon pekerja migran
 - Program rehabilitasi untuk migran yang telah kembali (ex. LFTU)
 - Mendirikan pusat layanan (atau Departemen Migrasi) (contoh: serikat pekerja di Nepal dan Korea)

- 
- Campaign for the revision of labour law or the government policy on migration, in order to guarantee the fundamental labour rights (ex. unions in Cambodia and Vietnam).
 - Adopt a Code of Conduct for ethical recruitment by recruitment agencies (ex. VGCL)
 - Provide helpline services (through mobile SMS) (ex. TU SMS Helpline - a joint initiative by BWI, PSI, UNI and their affiliates in Malaysia)
 - sending text messages to Helpline

- 
- Organise social and cultural events (OSH, talent shows, etc) regularly with migrant workers to help them integrate in the society (ex. Trade unions in Nepal and Singapore)
 - Provide legal services (ex. Trade unions in Korea and the Philippines)
 - Develop a union policy and action plan and influence the government's policy and legislation on migration (ex. trade unions in Thailand, Cambodia and Myanmar)



TERIMA KASIH